



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

UNIT KERJA :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TONO PRIHATONO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 831139

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 660.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 93.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SPD MOTOR SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SPD MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, DATSUN GO PANCA T 1.2 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.181.786

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	769.181.786
III. HUTANG	Rp.	1.380.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-610.818.214

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.